

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah Di Pulau Jawa

Rani Eka Diansari¹, Asti Wulandari², Dekeng Setyo Budiarto³
Universitas PGRI Yogyakarta
ranieka@upy.ac.id

Abstract

The purposes of this paper is to understand the influence of the performance of the local government finance as proxied by financial ratio on the accountability of local government financial statements by providing BPK opinion. The population in this paper is the district governments on the island of Java within the period of 2016-2020. This research used purposive sampling method with a total 200 samples from the observation of 40 local government on the island of java analyzed using ordinal logistic regression analysis. The result show that ratio of regional financial independence and effectiveness of local revenue has an effect on the provision of BPK's opinion, while the capital expenditure efficiency ratio, regional financial dependence ratio, and the degree of decentralization does not effect on on the provision of BPK's opinion.

Keywords: *financial performance, accountability, BPK's opinion, fiscal decentralization, Financial Ratio*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara kinerja dari keuangan pemerintah daerah yang diprosikan dengan menggunakan rasio keuangan, terhadap akuntabilitas informasi keuangan pemda dengan pemberian opini BPK. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Pulau Jawa dengan periode penelitian antara tahun 2016-2020. Riset ini memakai metode purposive sampling dengan total sampel sebanyak 200 data pengamatan dari 40 pemerintahan daerah di Pulau Jawa yang dianalisis menggunakan analisis regresi logistik ordinal. Hasil penelitian ini menunjukkan jika rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pemberian opini BPK, sedangkan rasio efisiensi belanja modal, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Akuntabilitas, Opini BPK, Desentralisasi Fiskal, Rasio Keuangan

Tanggal Submit : 2 Maret 2022
Tanggal Revisi : 30 Maret 2022
Tanggal Publish : 31 Maret 2022

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi pada dasarnya adalah sebuah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom yang didasarkan oleh Asas Otonomi. Pengertian tersebut sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya proses desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Pelaksanaan desentralisasi yang dimulai sejak tahun 2001 diharapkan dapat mendukung terwujudnya kepentingan bersama dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, karakteristik daerah, mengembangkan pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi, serta peningkatan daya saing daerah dalam kesatuan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

APBD merupakan penggambaran dari alat kebijakan utama yang digunakan oleh pemerintah daerah. APBD merupakan inti dari pengembangan kapasitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Besarnya APBD yang dikururkan memberikan desakan yang tinggi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Wibowo (2019), sistem akuntabilitas telah menjadi syarat mutlak bagi tata kelola institusi sektor publik di wilayah Indonesia, terutama pasca pembaruan pada tahun 1998, yang dibuktikan dengan meningkatnya desakan akuntabilitas pada tata kelola keuangan oleh organisasi sektor publik pada tingkat pusat dan daerah. Laporan pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah yang didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atas pelaksanaan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya akan dinilai keaslian, keakuratan, dan keandalan informasi yang diberikan dalam bentuk opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang didasarkan pada UU No. 15 Tahun 2004, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ada 4 (empat) macam opini yang dialokasikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan terhadap informasi keuangan Pemerintah tersebut, meliputi opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar, serta maklumat menolak memberikan opini.

Seperti yang disampaikan oleh Muraiya dan Nadirsyah (2018) dalam penelitiannya, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK terhadap LKPD dapat digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas instansi pemerintah, termasuk opini audit yang menunjukkan tingkat kewajaran penyampaian informasi keuangan tahunan.

Rante, Salle, & Marlissa (2018) berpendapat bahwa: "Opini BPK yang mengungkapkan bahwa informasi keuangan pemerintah adalah WTP (wajar tanpa pengecualian) akan memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat atas informasi yang tercantum dalam laporan tersebut". Berdasarkan data yang telah diolah, data opini audit BPK RI yang telah terupdate selama tahun 2016-2020 membuktikan bahwa 96% pemerintah daerah di Pulau Jawa telah mengalami peningkatan opini audit dari selain WDP menjadi WTP.

Rasio kemandirian daerah, merupakan rasio yang menilai sejauh mana pemda menggantungkan sumber dana yang berasal dari pendanaan eksternal (Saputra, 2014). Jika rasio ini tinggi, hal ini mengartikan bahwa pemda semakin tidak bergantung pada sumber pendanaan eksternal, yang berarti pemerintah daerah telah mandiri, begitu pula sebaliknya. Menurut pendapat Zuhri & Soleh (2016) bahwa: "Rasio efisiensi belanja daerah merupakan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, dengan realisasi pendapatan yang diterima". Apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100%, pemerintah daerah dianggap efektif. Semakin rendah rasio efisiensi semakin baik kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu menghitung secara rinci jumlah biaya yang terlibat dalam menghasilkan semua pendapatan sehingga mereka tahu bagaimana mengumpulkan pendapatan secara efektif. Hal tersebut perlu diberlakukan, walaupun pemerintah daerah telah mencapai pendapatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun tidak ada artinya jika biaya perolehan pendapatan lebih tinggi daripada biaya perolehan pendapatan (Pramono, 2014).

Rasio efektivitas PAD adalah kapasitas pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan daerah yang telah terencana dan target berdasarkan kemampuan daerah yang sebenarnya. (D. Kartika, 2017). Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah perbandingan antara total pendapatan transfer yang direalisasikan pada tahun tersebut terhadap total pendapatan daerah yang direalisasikan pada tahun berjalan (Zulkarnain, 2020). Menurut Ahyaruddin & Amrillah (2018),

Derajat desentralisasi mengacu pada sejauh mana total pendapatan asli suatu wilayah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar daripada total penerimaan wilayah tersebut.

Hasil riset yang diungkapkan Erryana & Setyawan (2016) mengemukakan jika rasio kemandirian, rasio belanja modal dan status daerah berpengaruh positif terhadap pemberian Opini BPK, sedangkan rasio ketergantungan, rasio efektivitas serta rasio belanja operasional berpengaruh negatif terhadap pemberian opini BPK. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2019) memiliki hasil bahwa efisiensi belanja serta rasio likuiditas memiliki pengaruh terhadap pemberian opini BPK, namun Efisiensi Pendapatan dan Rasio Solvabilitas tidak memiliki pengaruh terkait pemberian opini BPK. Penelitian lainnya tentang kinerja keuangan dan opini BPK juga dilakukan oleh Parwanto & Harto (2017), menyimpulkan jika opini pemeriksaan dan ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun temuan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ditasari & Sudrajat (2019) menyatakan jika opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Dari penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan riset dengan mengambil judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK (Pada Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2016-2020)”.

B. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. KAJIAN TEORI

a. Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah keadaan dimana para manajer tidak didorong oleh kepentingan pribadi, tetapi termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal (Raharjo, 2007). .

Model teori Stewardship ini menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai organisasi non profit yang diharapkan mampu mencapai good corporate governance, maka dari itu pemerintah daerah harus memiliki akuntabilitas kinerja keuangan yang baik.

b. Otonomi Daerah

Safitri (2016) menyampaikan bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan anggarannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dimana Pemerintah melaksanakannya sesuai dengan prinsip desentralisasi”. Menurut pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap daerah memperoleh otonomi dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, hak dan kekuasaan terutama untuk mengelola kekayaan alam dan ekonomi wilayahnya masing-masing.

c. Akuntabilitas

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (2011), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada semua pihak yang memiliki hak untuk meminta informasi atau tanggung jawab, serta kewajiban untuk menanggapi dan menjelaskan kinerja dan perilaku orang perseorangan atau pimpinan kolektif badan hukum/organisasi.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berarti instansi pemerintah berkewajiban bertanggung jawab atas berhasil tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan melalui perangkat pertanggungjawaban secara periodik (Darwanis & Chairunnisa, 2013).

Prinsip dari akuntabilitas publik yakni penggunaan nilai atau standar eksternal yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang berkepentingan terhadap pelayanan untuk mengukur tingkat konsistensi pemberian pelayanan.

d. Opini BPK

Mengenai standar untuk menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004, opini adalah pernyataan profesional yang dibuat oleh akuntan publik bersertifikat atas kecukupan informasi keuangan berdasarkan standar berikut: (a) Mematuhi standar akuntansi pemerintah, (b) Pengungkapan yang wajar, (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (d) Efektivitas sistem pengendalian internal.

Berlandaskan Peraturan Perundang-undangan No. 15 Tahun 2004, BPK RI mengeluarkan 4 (empat) macam opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, yakni: 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian, 3) Opini Tidak Wajar, 4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini

e. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Wibowo (2019) mengemukakan; “Tujuan serta manfaat pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan publik. Selain itu, laporan keuangan dapat digunakan untuk memberikan informasi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik”.

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah diukur dalam bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana pemerintah daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat menentukan status keuangan pemerintah daerah dan bagaimana pemerintah menghimpun dan menggunakan dana pemerintah daerah. Pada lingkup sektor publik, kinerja keuangan pemerintah dapat dilihat dari pergerakan keuangan dalam kegiatan operasionalnya (Majid, 2019).

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK

Mudhofar & Tahar (2016) berpendapat bahwa: “Pertumbuhan ekonomi didorong oleh desentralisasi fiskal, yang membuat setiap daerah mandiri dalam menghimpun dana. Jika pemerintah daerah memiliki sistem akuntabilitas yang baik, dana itu sendiri akan diterima oleh pemberi dana/investor”. Sehingga, akuntabilitas dalam bentuk Opini WTP yang diberikan oleh BPK merupakan suatu aspek yang harus dipenuhi oleh Pemda agar kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap pemerintah semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Erryana & Setyawan (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari Kemandirian Keuangan Daerah terhadap pemberian Opini BPK. Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang penulis kembangkan pada riset ini yakni:

H1: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK

b. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK

Rahmayati (2016) mengemukakan bahwa: “Rasio Efektivitas PAD merupakan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila mencapai 100%, namun semakin tinggi rasio efektivitas ini menggambarkan semakin baik kemampuan suatu daerah. Penelitian yang dilakukan (Parwanto & Harto (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas berpengaruh terhadap pemberian opini oleh BPK.

Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang penulis kembangkan pada penelitian ini adalah:

H2: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK

c. Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK

Rahmayati (2016) mengemukakan bahwa: “Rasio dalam Analisis Efisiensi Belanja Daerah digunakan untuk mengukur penghematan anggaran pemerintah daerah. Apabila efisiensi lebih rendah dari 100%, pemerintah daerah menganggap efisiensi anggaran telah efisien, sebaliknya apabila efisiensi lebih tinggi dari 100%, maka terindikasi pemborosan anggaran”. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2019) mengungkapkan jika rasio efisiensi belanja memiliki pengaruh terhadap pemberian opini BPK.

Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang penulis kembangkan pada penelitian ini adalah:

H3: Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

d. Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK

Zulkarnain (2020) berpendapat bahwa: “Rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah merupakan perbandingan antara total pendapatan transfer yang direalisasikan pada tahun tersebut dengan total pendapatan daerah yang direalisasikan pada tahun berjalan”.

Indramawan (2018) berpendapat: “Semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat”. Semakin mandiri suatu Pemda, semakin kecil ketergantungannya pada pemerintah pusat dan akan bertambah baik tingkat akuntabilitas berupa opini audit yang akan diupayakan. oleh Pemda tersebut (Mudhofar & Tahar, 2016). Riset yang telah dilakukan oleh (Rachmat, 2019) mengungkapkan bahwa rasio ketergantungan daerah memiliki pengaruh terhadap pemberian opini BPK.

Dari uraian diatas maka hipotesis yang penulis kembangkan pada penelitian ini adalah:

H4: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK

e. Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap Pemberian Opini BPK

Rasio Derajat Desentralisasi merupakan proporsi dari total PAD yang direalisasikan pada tahun tersebut terhadap total pendapatan daerah yang direalisasikan pada tahun tersebut (Pramono, 2014). Rasio ini menunjukkan bagaimana masyarakat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan bea daerah serta bagi hasil BUMD untuk mendukung total pendapatan daerah.

Indramawan (2018) mengungkapkan bahwa: “Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat”. Riset yang telah dilakukan oleh Ahyaruddin & Amrillah (2018) mengemukakan bahwa derajat desentralisasi mempunyai pengaruh terhadap pemberian opini BPK.

Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang penulis kembangkan pada penelitian ini adalah:

H5: Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap.pemberian.Opini BPK

C. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sample

Populasi pada riset ini yakni seluruh Kab/Kota/Provinsi pada wilayah Pulau Jawa yang berjumlah total 119 kab/kota/provinsi tahun 2016-2020. Standar pengambilan sampel dalam riset ini adalah menggunakan teknik purposive sampling dengan ketentuan Pemda dengan LKPD yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2016-2020 serta Pemerintah Daerah yang telah mempublikasi Laporan Realisasi Anggarannya hingga tahun 2020.

Berdasarkan kriteria diatas, maka didapat sampel dengan jumlah 40 sampel terdiri dari 3 provinsi, 10 kota, dan 27 kabupaten. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data. sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi.

2. Variabel serta Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan para riset ini terdiri dari variabel dependen yakni Opini BPK RI terhadap LKPD yang terdiri dari opini WTP, WDP, TW, dan TMP yang diprosikan dengan variabel. dummy dimana apabila LKPD mendapat opini WTP maka diberi skor 1, dan apabila LKPD mendapatkan opini selain WTP maka akan diberikan skor 0. Sedangkan variabel bebas atau independen adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja daerah, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, rasio Desentralisasi Fiskal.

Tabel 1. Pengukuran variabel

Varibel	Pengukuran
Opini BPK	WTP = 1 Non WTP = 0
Rasio Kemandirian (RKKD)	$\frac{PAD}{PENDAPATAN TRANSFER} \times 100\%$
Rasio Efektivitas PAD	$\frac{Realisasi PAD}{Anggaran PAD} \times 100\%$
Rasio Efisiensi belanja daerah	$\frac{Realisasi Belanja Daerah}{Anggaran Belanja} \times 100\%$

Rasio Ketergantungan	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Derajat Desentralisasi	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

3. Analisis Data

Analisis data yang dipakai pada penelitian ini yakni dengan menggunakan persamaan analisis regresi logistik. Pertimbangan dalam pemilihan analisis regresi logistik ini yakni data yang digunakan pada riset ini bersifat non-metrik pada variabel dependennya, sedangkan variabel independennya menggunakan data metrik. Hal tersebut menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi. Tujuan dari regresi logistik ini adalah untuk menguji apakah variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas variabel dependen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Hosmer and Lemeshow's

Tabel 2. Uji Hosmer & Lesmeshow Test

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.225	8	.836

Sumber : SPSS, Data diolah Peneliti 2021

Hasil uji diatas menampilkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (nilai signifikan) yakni $0.838 \geq 0.05$, maka bisa dinyatakan bahwa H_0 diterima. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara model dengan data, sehingga model regresi dalam penelitian ini dikatakan layak serta mampu untuk memprediksi nilai pada penelitiannya.

2. Uji Simultan

Uji simultan dikatakan berpengaruh apabila nilai sig. < 0,05.

Tabel 3. Uji Signifikansi secara simultan
Omnibus Test

Step 1	Step	Chi-square	Df	Sig.
	Block	14.736	5	.012
	Model	14.736	5	.012

Sumber : SPSS, Data diolah Peneliti 2021

Nilai sig. sebesar 0,012 dan ini kurang dari 0,05 maka kesimpulannya adalah secara simultan, variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yakni Opini BPK.

3. Uji Parsial (Uji WaId)

Tabel 4. Uji Secara Parsial

Variabel in the equation							
		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	RKKD	-.061	.024	6.618	1	.010	.941
	Efektivitas	-.037	.015	6.218	1	.013	.963
	Efisiensi	.012	.035	.127	1	.721	1.013
	Ketergantungan	-.095	.095	1.001	1	.317	.910
	Desentralisasi	.148	.120	1.535	1	.215	1.160
	Constant	12.559	8.680	2.094	1	.148	2.846

Sumber : SPSS, Data diolah Peneliti 2021

Berdasarkan tabel uji wald, dapat ditunjukkan bahwa variabel independen yang dapat berpengaruh terhadap pemberian opini BPK adalah Rasio. Kemandirian. Keuangan. Daerah (RKKD) dan Rasio. Efektivitas PAD yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK.

Laporan keuangan yang dibuat oleh Pemda merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat atas tata kelola keuangan daerah. Masyarakat memberikan wewenang terhadap pengelolaan keuangannya, yang disampaikan dalam wujud pajak serta bea masuk. Tujuan audit adalah untuk mendalami apakah laporan keuangan pemerintah daerah sudah baik. Pemeriksaan akhir dilakukan oleh BPK, yang merupakan lembaga audit independen yang dipercayakan oleh negara, untuk meninjau tata kelola anggaran kota untuk mendapatkan opini audit.

Berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK, rakyat bisa menentukan apakah pengelolaan keuangan yang mereka percayakan kepada pemda sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah dan efektivitas PAD dapat membantu menghasilkan opini BPK atas informasi keuangan pemda.

E. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

1. Simpulan

Bersumber pada hasil analisis serta pembahasan data yang diuraikan, riset ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK atas LKPD Pemerintah Prov/Kab/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2020.
- 2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK atas LKPD Pemerintah. Prov/Kab/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2020.
- 3) Rasio Efisiensi Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK atas LKPD Pemerintah Prov/Kab/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2020.
- 4) Rasio Ketergantungan Daerah tidak berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK atas LKPD Pemerintah Prov/Kab/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2020.
- 5) Derajat Desentralisasi berpengaruh tidak berpengaruh terhadap pemberian Opini BPK atas LKPD Pemerintah Prov/Kab/Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2020.
- 6) Secara simultan, kinerja keuangan Pemerintah Prov/Kota/Kab di Pulau Jawa tahun 2016-2020 yang diprosikan dengan variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah dan Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berupa pemberian Opini BPK.

2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yakni:

- 1) Riset ini dilakukan pada bulan November 2020 - Agustus 2021 dan sesuai PMK No. 231.PMK.07/2021, LKPD yang telah diperiksa oleh BPK disampaikan ke DJPK paling lambat tanggal 31 Agustus, maka ketersediaan publikasi data LRA tahun 2020 baru tersedia paling cepat bulan Oktober 2021.
- 2) Peneliti mengambil data LRA tahun 2020 dengan membuka satu per satu web pemerintah daerah dimana tidak semua pemerintah daerah mempublikasi laporan keuangannya dengan lengkap. Maka dari itu riset ini hanya didapat sampel yang berjumlah 40 pemerintah daerah dari 119 pemerintah daerah di Pulau Jawa.

3. Saran

Bersumber pada hasil riset serta keterbatasan dalam penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan yakni:

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci. Melalui penggunaan berbagai macam rasio yang lebih merealisasikan kondisi keuangan pemda.

- 2) Pada penelitian ini kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hanya 24,9%. Untuk itu, saran untuk para peneliti selanjutnya supaya bisa menambahkan variabel yang memiliki pengaruh terhadap pemberian opini seperti jumlah temuan, tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan dan lain-lain.
- 3) Pada penelitian selanjutnya disarankan agar menjadikan total populasi sebagai sampel agar dapat menunjukkan keadaan yang lebih akurat.

REFERENCE

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah; *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*: 9(3), 471–486.
- Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*: 6(2), 150–174.
- Ditasari, R.A., & Sudrajat, A. (2019). Inventory: *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 2 Oktober 2019: 3(2), 159 – 173.
- Erryana, V., & Setyawan, H. (2016). Determinan Akuntabilitas Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah): *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5 (1), 1.
- Hamidayanti, L., & Wardani, M. K. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT. 685–697.
- Indramawan, D. (2018). *The Impacts Of Financial Performance Of Local*: (23).
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (C. B. Utami, ed.). Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia ; *Efek Moderasi dari Kinerja*: 17 (2),176–185.
- Muraiya & Nadirsyah. 2018. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh” : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)* 3(2):236–53.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting: Analysis Journal*; 5 (1), 1–10.
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: *Diponegoro Journal of Accounting*; 6(1), 35–43.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: *Jurnal Ilmiah Among Makarti*; 7, 83–112.
- Rachmat, D. M. (2019). Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dengan Kinerja Sebagai VariabelModerasi.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi: *Fokus Ekonomi*; 2 (1) , 37 – 46.
- Rahmayati. A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. 1 (1), 40 – 54.
- Rante, I., Salle, A., & Marlissa, E. R. (2018). Analisis terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pegunungan bintang. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1–12.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidilkan Sejarah*, 5(9), 79–83.

- Sarmiyatiningsih, A. R. D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 1(2), 31–42.
- Wibowo, S. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dan Pemberian Opini Atas laporan keuangan Audited. 5(1), 41–52.
- Zulkarnain,. Z.(2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah. Untuk Mengukur' Kinerja 'Keuangan. 3(April), 61–74.